

**ANALISIS KEBIJAKAN PEMBERIAN KREDIT TERHADAP
NON PERFORMING LOAN
(STUDI PADA BANK TABUNGAN NEGARA (Persero), Tbk CABANG
MAKASSAR PERIODE 2007-2011)**

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi



Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

**PRATIWI
A211 08 960**

**JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2012**

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS KEBIJAKAN PEMBERIAN KREDIT TERHADAP *NON*

PERFORMING LOAN

(STUDI PADA PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO), Tbk CABANG MAKASSAR
PERIODE 2007-2011)

Diajukan oleh:

PRATIWI

A 2 1 1 0 8 9 6 0

Skripsi Sarjana Lengkap untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

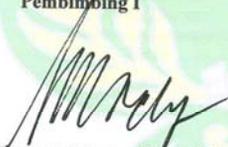
Jurusan Manajemen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Hasanuddin Makassar

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Muhammad Yunus Amar, SE., MT
NIP. 19620430 198810 1 001


Shinta Dewi Tikson, SE., M.MGT
NIP. 19810530 200912 2 003

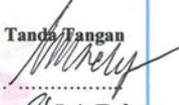
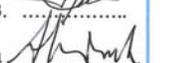
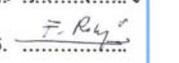
**ANALISIS KEBIJAKAN PEMBERIAN KREDIT TERHADAP NON
PERFORMING LOAN
(STUDI PADA PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO), TBK
CABANG MAKASSAR)**

Dipersiapkan dan Disusun Oleh

PRATIWI
A211 08 960

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 25 Juli 2012
Dan Dinyatakan LULUS

DEWAN PENGUJI:

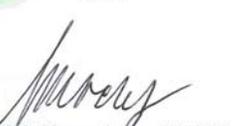
No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Muhammad Yunus Amar, SE.,MT	Ketua	1. 
2.	Shinta Dewi Tikson, SE., M.MGT	Wakil Ketua	2. 
3.	Prof.Dr. H. Cepi Pahlevi, SE., M.Si	Anggota	3. 
4.	Dr. H. Abd. Rakhman Laba, SE., MBA	Anggota	4. 
5.	Fauzi R. Rahim, SE., M.Si	Anggota	5. 

Disetujui:

Jurusan Manajemen
Fakultas Ekonomi
Universitas Hasanuddin
Ketua,

Tim Penguji
Jurusan Manajemen
Fakultas Ekonomi
Ketua,


Dr. Muh Yunus Amar, SE.,MT
NIP.19620430 198810 1 001


Dr. Muh. Yunus Amar, SE., MT
NIP. 19620430 198810 1 001

ABSTRACT

PRATIWI A211 08 960, *Analysis of lending policy towards non-performing loans at PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Makassar Branch. (supervised by DR. Muhammad Yunus Amar, SE., MT and Shinta Dewi Tikson, SE., M, MGT)*

The research was conducted to determine the lending policy applied to the PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Makassar Branch, using the principle of 5 C in accordance with the provisions of Bank Indonesia related to customer eligibility for loans in addition, to see significant effects associated with strong or weak credit supplied which can be seen from the percentage of loan to deposit ratio of non-performing loan.

During the observation period showed that the PT. Bank Tabungan Negara (Persero,) Tbk Makassar Branch has used credit policy with the principle of 5 C in accordance with the policies associated with the lending banks. These results indicate that the amount of credit (loan to deposit ratio) was significantly stronger effect on non-performing loans. Ability of credit (loan to deposit Rati) of 96.3% o effect on the level of non performing loan bank. While the remaining 3.7% is influenced by other variables not addressed in this study.

KeyWord : Lending policies (principle 5 C, namely Character, Capacity, Capital, Collateral and Condition), non-performing loans..

ABSTRAKSI

PRATIWI A211 08 960. Analisis Kebijakan Pemberian Kredit Terhadap *Non Performing Loan* Pada PT. Bank Tabungan Negara (persero), Tbk Cabang Makassar (dibimbing oleh. Dr. MUH. YUNUS AMAR, SE., MT dan SHINTA DEWI TIKSON, SE., M,MGT).

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kebijakan pemberian kredit yang diterapkan pada PT. Bank Tabungan Negara (persero), Tbk Cabang Makassar, dengan menggunakan prinsip 5 C sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia terkait dengan kelayakan nasabah dalam memperoleh kredit. Selain itu, untuk melihat pengaruh yang signifikan kuat atau lemah terkait dengan pemberian kredit yang disalurkan oleh PT. Bank Tabungan Negara Cab. Makassar yang dapat dilihat dari persentase *loan to deposit ratio* terhadap *no performing loan*.

Selama periode pengamatan menunjukkan bahwa PT. Bank Tabungan Negara (persero) Tbk Cab. Makassar telah menggunakan kebijakan pemberian kredit dengan prinsip 5 C sesuai dengan kebijakan perbankan terkait dengan penyaluran kredit. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa besarnya penyaluran kredit (*loan to deposit ratio*) berpengaruh signifikan kuat terhadap *non performing loan*. Kemampuan penyaluran kredit (*loan to deposit rati*)o berpengaruh sebesar 96,3% terhadap tingkat *non performing loan bank*. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 3,7% dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

Kata Kunci :

Kebijakan Pemberian Kredit (prinsip 5 C, yaitu *Character, Capcity, Capital, Colletral and Condition*), *Non Performing Loan*.

KATA PENGANTAR
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Allahumma Shalli ‘Ala Muhammad Wa ‘Ala Ali Muhammad

Segala puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah SWT atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya serta salawat dan salam teruntuk untuk nabi Muhammad Rasulullah SAW sebagai nabi yang menjadi tauladan bagi seluruh ummat manusia sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata Satu pada Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin.

Setelah melewati perjuangan yang panjang dalam penyelesaian skripsi, penulis menyadari bahwa kesempurnaan bukanlah milik manusia. Namun demikian penulis berusaha memberikan suatu karya yang diharapkan dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan di masa yang akan datang. Sejalan dengan itu semoga ilmu pengetahuan yang penulis peroleh dalam bangku kuliah tidak menjadi sia-sia dan dapat menjadi sandaran dalam menjalani kehidupan setelah memperoleh gelar kesarjanaan.

Terlepas dari semua rencana Allah SWT dalam hidup, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan mereka yang telah membuka hati, meluangkan waktu, pikiran dan doa,serta senantiasa mengulurkan tangan. Oleh karena itu, dengan segenap hati, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak termasuk yang mungkin tidak disebutkan dibawah ini :

1. Ucapan terima kasih teristimewa dan terkasih untuk kedua orang tua, **Drs. Muhammad Saleh** dan **Nurhadi** untuk segala cinta dan kasih sayang yang tak terhingga, dan doa yang tulus sehingga penulis dapat meraih gelar sarjana. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya buat **ka'Eky, Ka' Whati** dan **Ka'Mhila** yang selalu memberikan bantuan baik itu merupakan nasehat maupun sumbangsih dalam proses penyelesaian tugas akhir ini. Juga buat adik-adik terkasih **Idham** dan **Acci**.
2. **Prof.DR.H.Muhammad Ali, SE., MSi**, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
3. Bapak **DR. Muhammad Yunus Amar, SE., MT** selaku dosen pembimbing I dalam penulisan tugas akhir ini dan juga sebagai Ketua Jurusan Manajemen, yang telah meluangkan waktunya dan tenaganya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan guna terselesaikannya penulisan ini. Suatu kebanggaan bagi penulis dapat dibimbing oleh bapak dalam penyelesaian tugas akhir ini.
4. Ibu **Shinta Dewi Tikson, SE., M,MGT** selaku dosen pembimbing II dalam penulisan tugas akhir ini yang telah banyak meluangkan waktu, memberikan nasehat, memberikan solusi, bahkan membagikan ilmu yang sangat berharga bagi penyelesaian tugas akhir ini. Suatu kebanggaan bagi penulis dapat dibimbing oleh ibu dalam penyelesaian tugas akhir ini.
5. Bapak dosen penguji : **Prof. Dr. H. Cepi Pahlevi, SE., MSi**, **Dr. H. Abd. Rakhman Laba, MBA** dan **Fauzi R. Rahim, SE., MSi** atas segala masukan dan saran guna perbaikan skripsi ini.

6. **Abdullah Sanusi, SE.,MBA** selaku penasehat akademik penulis yang sedang menempuh pendidikan di Inggris, terima kasih atas perhatian dan dukungannya.
7. **Dr. Yansor Jaya, MA** selaku penasehat akademik penulis atas segala masukan dan arahnya.
8. Bapak, Ibu Dosen yang telah membagikan ilmunya dan dengan begitu sabar membimbing kami menjadi manusia yang lebih berintelektual dan berkualitas.
9. Kepada Pimpinan dan Staff PT. Bank Tabungan Negara (persero), Tbk Cab.Makassar atas izin yang diberikan untuk melakukan penelitian dan membantu dalam penyelesaian penulisan ini.
10. Para Staf dan Pegawai Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin yang telah banyak memberikan bantuan dan pertolongannya dalam penyelesaian tugas akhir ini.
11. Buat seluruh keluarga besarku terima kasih atas motivasi dan dukungannya.
12. Teruntuk special buat “Kawan Terbaik” : Cho2 (Dewi Mirany), Che2 (Andi Dahlia Tappu).
13. Sahabat-sahabat volume '08 yang selalu menemani dalam suka maupun duka dalam melewati masa-masa perkuliahan, dan teman seperjuangan dalam menyelesaikan tugas kuliah, Resky Astrini , Wahyuni, Annisa Tamba, Asniati Mulyana, Siti Hadija Bahar, Senny Mappantau, Edith Theresa dll.

14. Keluarga besar Gedung Putih (*white House*) yang telah menjadi *second family* yang menjadi tempat berbagi duka dan tawa, teruntuk untuk Kadrina Rauf atas waktunya yang selalu mendengarkan keluh kesah dalam penyelesaian tugas ini
15. Pihak-pihak lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwasanya dalam penyusunan dan penyajian skripsi ini masih jauh dari sebuah kesempurnaan. Kesempurnaan hanya milik-Nya, penulis adalah seorang yang tak lepas dari sebuah kesalahan karena tiada gading yang tak retak, begitu kata pepatah. Namun penulis mempunyai keinginan yang sangat tinggi dalam sebuah upaya mencapai yang terbaik dalam penyajian dan penyusunan skripsi ini. Segala komentar, kritik, dan saran mengenai skripsi ini akan diterima dengan senang hati. Akhir kata, penulis sangat berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Amin..

Makassar, 2012

PRATIWI

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Pengesahan	ii
Abstrak	iii
Abstract	iv
Kata Pengantar	v
Daftar isi	x
Daftar Tabel	xiii
Daftar Gambar	xiv

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penulisan	10
1.5. Sistematika Penulisan	10

BAB II : LANDASAN TEORI

2.1. Tinjauan Umum	12
2.1.1. Bank	12
2.1.2. Kredit	14
2.1.3. Prinsip-prinsip Pemberian Kredit.....	19
2.1.4. <i>Loan To Deposit Ratio</i>	25
2.1.5. Kredit Bermasalah (NPL)	27
2.1.6. Penyelematan dan Penyelesaian Kredit Macet	37
2.2. Kajian Empiris	40

2.3. Kerangka Pikir	42
2.4. Hipotesis	44
BAB III : METODE PENELITIAN	
3.1. Lokasi Penelitian	45
3.2. Jenis dan Sumber Data	45
3.3. Identifikasi Variabel Penelitian	46
3.4. Definisi Operasional	47
3.5. Teknik Analisis Data	49
3.5.1 Analisis Deskriptif	49
3.5.2 Analisis Regresi Sederhana	49
3.5.3 Analisis Koefisien Korelasi	50
3.5.4 Analisis Koefisien Determinasi (r^2)	50
3.5.5 Pengujian Hipotesis	51
3.5.2.1 Pengujian Secara Simultan (Uji F)	51
3.5.2.2 Pengujian Secara Parsial (Uji T)	52
BAB IV : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	
4.1. Sejarah Singkat Perusahaan	54
4.2. visi dan Misi Perusahaan	56
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
5.1. Analisis Deskriptif Kebijakan Pemberian Kredit	58
5.1.1 Kebijakan Pemberian Kredit pada PT. Bank Tabungan Negara (persero),Cab. Makassar dengan Prinsip 5C.....	69
5.1.2 Pengelolaan Tingkat NPL pada PT. Bank Tabungan Negara (persero), Tbk Cab. Makassar	73
5.1.3 Pengaruh Kebijakan Pemberian Kredit Terhadap NPL pada	

PT. Bank Tabungan Negara Cab. Makassar	76
5.1.4 Upaya Penyelamatan Kredit Bermasalah	78
5.2 Analisis Regresi Sederhana	83
5.3 Analisis Koefisien Korelasi	85
5.4 Analisis Koefisien Determinasi (r^2)	86
5.5 Pengujian Hipotesis	87
5.5.1 Uji Secara Simultan (uji f)	87
5.5.2 Uji Secara Parsial (Uji t)	88
5.6 Pertumbuhan Tingkat NPL (Tahun 2007-2011) Pada PT. Bank Tabungan Negara (persero), Tbk Cab. Makassar	89
BAB VI : PENUTUP	
6.1 Kesimpulan	92
6.2 Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1. Posisi Dana PT.Bank Tabungan Negara Cab. Makassar	5
1.2. Realisasi Kredit PT.Bank Tabungan Negara Cab. Makassar	6
1.3. Perkembangan NPL PT.Bank Tabungan Negara Cab. Makassar.....	8
2.1. Penyebab Kredit Macet	32
3.1. Definisi Operasional Variabel	47
5.1. Prinsip-prinsip Pemberian Kredit PT.Bank Tabungan Negara (persero),Tbk Cab. Makassar	72
5.2. Penggolongan Kualias Kredit	75
5.3 Empat Kategori Debitur Dan Langkah Hutang Penyelesaian Pada PT. Bank Tabungan Negara Cab. Makassar	79
5.4 Hasil Analisis Regresi Sederhana	83
5.5 Interpretasi Nilai r	83
5.6 Hasil Analisis Koefisien Korelasi	85
5.7 Hasil Analisis Koefisien Determinasi	86
5.8 Pengujian Secara Simultan (uji f).....	87
5.8 Pengujian Secara Parsial (uji t).....	88

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
2.1	Kerangka Pikir	37
5.1	Upaya Penyelamatan Kredit Bermasalah PT. Bank Tabungan Negara Cab. Makassar	78
5.2	Perkembangan NPL PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Makassar Tahun 2007-2011.....	89

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia perbankan yang telah terlihat semakin kompleks, dengan berbagai produk dan sistem usaha dalam berbagai keunggulan kompetitif. Keadaan yang kompleks ini telah menciptakan suatu sistem dan pesaing baru dalam dunia perbankan, bukan hanya persaingan antar bank tetapi juga antara bank dengan lembaga keuangan. Sector perbankan menjadi salah satu factor yang memegang peranan karena berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana melalui penciptaan produk yang beraneka ragam untuk ditawarkan kepada masyarakat yang ingin menggunakan jasa perbankan.

Bank adalah lembaga keuangan (financial institution) yang berfungsi sebagai perantara keuangan (financial intermediary) antara pihak yang kelebihan dana (surplus unit) dan pihak yang kekurangan dana (deficit unit). Melalui bank kelebihan dana tersebut dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Bank menerima simpanan uang dari masyarakat (dana pihak ketiga) dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit. Dari aktivitas bank tersebut tersalurkan berbagai produk bank sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh bank yang bersangkutan.

Kredit merupakan aktiva produktif yang memberikan pendapatan utama. Semakin besar tingkat atau proporsi penjualan kredit dari keseluruhan penjualan, maka semakin besar pula jumlah investasi kredit yang dimiliki perusahaan. Dengan besarnya volume penjualan kredit setiap tahunnya, berarti perusahaan tersebut harus menyediakan investasi yang lebih besar lagi. Adanya penjualan kredit yang dilakukan, dapat mengurangi kemungkinan risiko seperti munculnya

biaya penambahan pegawai dan pengurusan administrasi. Saat semua masalah ini bermunculan, secara langsung akan menghambat kelancaran operasional yang harus dicapai perusahaan. Oleh karena itu, sebelum melakukan pemberian kredit perusahaan harus memperhatikan unsur 5 C (*The Five of Credit*), yaitu *character, capacity, capital, collateral and condition*.

Pendapatan terbesar dalam bank yang dapat mempengaruhi modal adalah pendapatan bunga dan penyaluran kredit. karena dari peningkatan penyaluran kredit maka perolehan pendapatan bunga meningkat, meningkatnya perolehan pendapatan ini dapat menutupi seluruh beban termasuk NPL. Setelah pendapatan dikurangi beban dan NPL baru didapat laba dimana peningkatan laba ini akan mempengaruhi pertumbuhan modal. Karena penyaluran kredit memberikan pemasukan yang sangat besar maka masing-masing bank dalam membuat penyaluran kredit yang berbeda-beda. Dengan tujuan menambah jumlah modal, walaupun ada pendapatan bank yang diperoleh selain dari bunga misal : biaya administrasi tabungan dan jasa transfer.

Pengelolaan kredit bermasalah (*non performing loan*) menjadi sangat penting karena hal ini berdampak pada kinerja perusahaan. NPL ini menunjukkan seberapa besar kolektibilitas bank dalam mengumpulkan kembali kredit yang telah disalurkan. Tingginya NPL dapat mempengaruhi kebijakan bank dalam menyalurkan kreditnya yaitu bank menjadi lebih berhati-hati. Karena bank yang tetap memberikan kredit ketika NPL-nya tinggi berarti bank tersebut termasuk *risk taken*. Batas maksimum persentase kredit bermasalah pada setiap perbankan di Indonesia harus mengacu pada peraturan yang di buat oleh Bank Indonesia tentang batas kewajaran tingkat non performing loan yaitu sebesar 5%. Peraturan

ini penting agar setiap perbankan yang ada Indonesia tetap menjaga tingkat *Non performing loan*.

Tingkat kelangsungan usaha bank berkaitan erat dengan aktiva produktif yang dimilikinya, oleh karena itu manajemen bank dituntut untuk senantiasa dapat memantau dan menganalisis kualitas aktiva produktif yang dimilikinya. Kualitas aktiva produktif menunjukkan kualitas aset sehubungan dengan risiko kredit yang dihadapi oleh bank akibat pemberian kredit dan investasi dana bank.

Pertumbuhan kredit yang lambat tersebut ditengarai lebih disebabkan faktor penawaran yaitu keengganan bank untuk menyalurkan kredit, yang sering disebut sebagai fenomena credit crunch. Faktor yang biasanya mempengaruhi perilaku bank dalam menawarkan kredit perbankan dapat disebabkan oleh banyak hal seperti rendahnya kualitas aset perbankan, nilai Non Performing Loan yang tinggi atau mungkin saja anjloknya modal perbankan akibat depresiasi sehingga menurunkan kemampuan bank dalam memberikan pinjaman (Juda Agung, 2001).

Kesalahan dalam penyaluran dana lebih merugikan lagi jika tidak diproses dengan baik. Hal itu dapat menyebabkan banyaknya jumlah kredit yang macet. Jika hal ini dialami oleh bank maka tingkat profitabilitas bank tersebut akan mengalami penurunan dan ini akan berdampak pada citra perbankan itu sendiri di kalangan masyarakat.

Banyaknya jumlah kredit yang disalurkan akan menentukan laba yang diperoleh. Namun, tidak berarti jumlah kredit yang disalurkan akan memberikan laba yang besar pula, karena dalam penyaluran kredit kemungkinan timbul risiko kredit bermasalah dan hal ini akan berdampak pada tingkat *Non Performing Loan*

perbankan. Untuk itulah perlu adanya kebijakan pemberian kredit yang tepat dan efektif yang diterapkan perbankan agar tingkat kredit bermasalah dapat berkurang.

Salah satu indikator besarnya pemberian kredit oleh bank yaitu dapat dilihat dari persentase *Loan to Deposit Ratio* (LDR). *Loan to Deposit Ratio* (LDR) merupakan rasio untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan (Kasmir, 2008:290). Rasio LDR ini digunakan untuk mengetahui sampai sejauh mana dana masyarakat yang dihimpun oleh bank disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit. Kebijakan pemberian kredit yang mengandung prinsip kehati-hatian hendaknya diterapkan oleh bank dalam menentukan calon debitur yang benar-benar dapat menjaga dana kredit yang disalurkan dengan memilih calon debitur yang memiliki reputasi yang baik diharapkan nilai NPL akan turun di masa yang akan datang.

Besanya jumlah kredit yang disalurkan akan menentukan keuntungan yang diperoleh. Akan tetapi tidak berarti bahwa jumlah kredit yang disalurkan besar akan memberikan keuntungan yang besar pula. Dan hal ini akan berdampak pada tingkat *Non Performing Loan* perbankan. Untuk itulah perlu adanya kebijakan pemberian kredit yang tepat dan efektif yang diterapkan perbankan agar tingkat kredit bermasalah dapat berkurang.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara. Bank Tabungan Negara merupakan satu-satunya bank umum yang focus bisnisnya terhadap pembiayaan perumahan baik subsidi maupun yang non subsidi. Dengan focus bisnis tersebut maka bank BTN mempunyai peranan penting dalam

membantu pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia dengan menyediakan kredit perumahan dengan tingkat suku bunga yang rendah.

Posisi dana yang dimiliki oleh Bank BTN Cabang Makassar lima tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Posisi Dana PT Bank Tabungan Negara Cabang Makassar
Tahun 2007-2012
(Dalam Jutaan Rupiah)

Uraian	2007	2008	2009	2010	2011
Giro	148.911	165.663	191.784	181.157	229.183
Tabungan	333.980	372.589	411.832	479.060	571.589
Deposito	94.767	144.719	130.965	140.145	193.007
Jumlah	577.658	682.971	734.546	800.361	993.779

Sumber: Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Cabang Makassar

Berdasarkan data di atas, posisi dana bank BTN Cabang Makassar selama lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Tahun 2008 posisi dana bank BTN meningkat sebesar 18,23% dari Tahun 2007. Begitu pun pada Tahun 2009 meningkat sebesar 7.5% dari Tahun 2008. Seperti halnya pada tahun 2011 meningkat sebesar 24,16% dari tahun 2010. Dengan meningkatnya posisi dana yang dimiliki oleh PT Bank tabungan Negara Cab. Makassar maka hal ini kan berdampak pada jumlah kredit yang disalurkan kepada masyarakat.

Berikut ini adalah realisasi kredit PT Bank Tabungan Cabang Makassar dari tahun 2007-2011.

Tabel I.2
Realisasi Kredit PT Bank Tabungan Negara Cabang Makassar
Tahun 2007-2011
(Dalam Jutaan Rupiah)

Uraian	2007	2008	2009	2010	2011
Perumahan	341,120	512,730	495,991	616,236	610,978
KPR Subsidi	135,288	163,459	176,823	185,840	175,651
KPR Non Subsidi	155,027	295,853	282,862	352,080	370,686
a. Kredit Griya Utama	143,792	273,599	264,134	338,564	353,115
b. Kredit Pemilikan Ruko	9,818	21,016	18,283	12,148	15,818
Kredit Swagiya	1,417	1,237	445	1,369	1,450
d. Kredit Rusun	-	-	-	-	303
Non KPR	50,805	53,419	36,306	78,317	64,641
a. Kredit Griya Multi	50,776	53,419	36,306	78,317	61,182
Kredit Real Cash	29	-	-	-	2,864
Pendukung Perumahan	130,865	375,191	280,370	308,895	336,018
Kredit Yasa Griya	129,954	370,891	262,320	307,195	312,001
Housing Related	911	4,300	18,050	1,700	-
Kredit Lainnya	10,449	15,131	57,608	97,184	55,684
KUMK	2,940	2,074	35,667	45,208	419
Kredit Lain-lain	1,786		991	-	15,280
Kredit Ringan Batara	5,120	8,915	15,989	51,666	23,415

Kredit Pegawai	-	3,312	4,762	-	15,280
Kredit Swadana	603	30	200	310	1,291
Jumlah Realisasi Kredit	482,434	903,052	833,969	1,022,315	1,002,680

Sumber : Bank Tabungan Negara (persero),Tbk Cabang Makassar

Data di atas menunjukkan realisasi kredit PT BTN Cabang Makassar dari Tahun 2007-2008 mengalami peningkatan yang cukup signifikan hal ini disebabkan oleh peningkatan pada kredit perumahan subsidi maupun non subsidi. Tetapi pada Tahun 2009 terjadi penurunan realisasi kredit sebesar 69.083. Namun pada Tahun 2010 realisasi kredit Bank BTN Cabang Makassar Mengalami peningkatan, hal ini disebabkan karena sebagian besar produk kredit Bank BTN mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 terjadi penurunan realisasi jumlah kredit sebesar 19,635 dengan perbandingan tahun 2010.

Sementara data perkembangan *Non Performing Loan* pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Makassar pada Tahun 2007-2011:

Tabel 1.3
Perkembangan NPL
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Makassar
Tahun 2007-2011

Rasio	Tahun				
	2007	2008	2009	2010	2011
NPL (100%)	7,65	2,64	3,25	3,04	2,76

Sumber: Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Cabang Makassar

Dari data penelitian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dari tahun 2007-2008 terjadi penurunan NPL sebesar 5,01% tentu ini merupakan penurunan NPL yang baik bagi sebuah bank, tahun 2007 NPL diatas 5,0% hal ini tentu diatas batas maksimum tingkat NPL yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Akan tetapi berkat prinsip kehati-hatian dan kebijakan dari Bank BTN terkait dengan pemberian kredit dan penyelesaian kredit bermasalah sehingga pada tahun 2008 terjadi penurunan yang drastis. Namun, pada tahun 2009 terjadi kenaikan sebesar 0,61%. Yaitu dari 2,64 menjadi 3,25, kenaikan ini masih dalam dibawah dari standar tingkas NPL yang ditetapkan oleh BI. Penurunan NPL terus terjadi dari tahun 2010-2011, yaitu dari 3,04%- 2,76%.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang kebijakan pemberian kredit dan likuiditas pada PT Bank Tabungan Negara Cabang Makassar dengan judul penelitian: **“Analisis Kebijakan Pemberian Kredit terhadap *Non Performing Loan* pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Cabang Makassar “.**

1.2. Rumusan Masalah

Perumusan masalah pokok dari penelitian yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

- 1) Apakah kebijakan pemberian kredit yang diterapkan pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Makassar sudah sesuai dengan kebijakan perbankan?
- 2) Apakah banyaknya pemberian kredit memiliki pengaruh signifikan kuat terhadap *non performing loan* (NPL) pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Makassar?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan perumusan masalah yang telah di uraikan, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui kebijakan pemberian kredit terhadap *non performing loan* yang diterapkan pada Bank Tabungan Negara (persero), Tbk Cabang Makassar.
2. Membantu dan sekaligus sebagai dasar dalam pengambilan keputusan sehingga diperoleh tingkat *Non Performing Loan* yang rendah di masa yang akan datang.

1.4. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini, yaitu:

1. Bagi Penulis

Melatih ketajaman analisis dan meningkatkan khasanah ilmu pengetahuan terhadap kondisi riil dilapangan yang terkait dengan disiplin ilmu manajemen.

2. Bagi perusahaan

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan masukan bagi pimpinan perusahaan atau bank dalam rangka pengambilan langkah-langkah kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat likuiditas pada masa sekarang dan yang akan datang.

3. Bagi Akademis

Dapat digunakan sebagai sumber informasi atau dapat dipakai sebagai data sekunder dan sebagai bahan sumbangan pemikiran tentang peran dan fungsi manajemen keuangan,

2.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mendapatkan gambaran secara ringkas dalam penyusunan skripsi ini ini, maka penulis membaginya dalam enam bab, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II merupakan bab yang berisi landasan teori yang terdiri pengertian bank, pengertian kredit, kebijakan Pemberian kredit, dan pengertian *non performing loan* dan upaya penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah. Bab ini juga memuat kajian empiris, kerangka teori dan hipotesis.

Bab III merupakan bab yang berisi tentang metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel penelitian dan teknik analisis data.

Bab IV merupakan bab yang berisi tentang gambaran umum perusahaan yang mencakup sejarah PT Bank Tabungan Negara, dan visi dan misi perusahaan.

Bab V merupakan bab yang berisi hasil penelitian dan pembahasan yang mencakup hasil analisis kebijakan pemberian kredit yang diterapkan PT Bank Tabungan Negara terhadap *non performing loan* dan penyelesaian kredit bermasalah.

Bab VI merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum

2.1.1. Bank

2.1.1.1. Pengertian Bank

Lembaga keuangan bank sangat penting peranannya dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Hal ini disebabkan karena lembaga keuangan bank mempunyai fungsi yang sangat mendukung terhadap pembangunan ekonomi suatu negara.

Dalam pembicaraan sehari-hari, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Disamping itu, bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah dan pembayaran lainnya.

*Berdasarkan UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan menyebutkan :
“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dan dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak”.*

Menurut Undang-undang RI nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 november 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Fungsi-fungsi perbankan tersebut, antara lain :

1. Lembaga kepercayaan masyarakat dalam kaitannya sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana,
2. Pelaksana kebijakan moneter,
3. Unsur pengguna sistem pembayaran yang efisien dan aman,
4. Lembaga yang ikut mendorong pertumbuhan dan pemerataan pendapatan.

Aktivitas perbankan yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat luas yang dikenal dengan istilah di dunia perbankan adalah kegiatan *funding*. Pengertian menghimpun dana maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas. Jenis simpanan yang dapat dipilih oleh masyarakat adalah seperti giro, tabungan, sertifikat deposito dan deposito berjangka. Setelah memperoleh dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat, maka oleh perbankan dana tersebut diputarkan kembali atau dijual kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan istilah kredit (*lending*). Dalam pemberian kredit juga dikenakan jasa pinjaman kepada penerima kredit (*debitur*) dalam bentuk bunga dan biaya administrasi. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah dapat berdasarkan bagi hasil atau penyertaan modal.

2.1.2. Kredit

2.1.2.1. Pengertian Kredit

Kredit bersal dari bahasa Yunani, *credere*, yang berarti kepercayaan. Dengan demikian istilah kredit memiliki arti khusus, yaitu meminjamkan uang (penundaan pembayaran). Dasar dari kredit adalah kepercayaan, oleh karena itu jika seseorang telah mendapatkan kredit berarti ia telah memperoleh kepercayaan.

Suatu pemberian kredit terjadi apabila didalamnya terkandung kepercayaan orang lain atau badan yang memberikan, kepada orang lain atau badan yang telah diberikan kredit harus memenuhi segala kewajiban pada waktunya. Orang atau badan yang memberikan kredit disebut kreditur, sedangkan orang atau badan yang menerima kredit disebut debitur.

Menurut Hasibuan, Manajemen Perbankan (1996:46), bahwa kredit adalah “semua jenis pinjaman uang atau barang yang wajib dibayar kembali bunganya oleh peminjam. Dalam hal ini, pihak bank memberi tarif bunga atau yang disebut bunga kredit dalam setiap permohonan kredit kepada pihak peminjam”.

Menurut Undang-Undang Perbankan nomor 10 tahun 1998 kredit adalah “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kredit adalah penyerahan nilai ekonomi sekarang atas kepercayaan dengan harapan mendapatkan kembali suatu nilai ekonomi yang sama di kemudian hari.

2.1.2.2. Unsur-Unsur Kredit

Dalam pemberian kredit, unsur kepercayaan adalah hal yang sangat mendasar yang menciptakan kesepakatan antara pihak yang memberikan kredit dan pihak yang menerima kredit untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban yang telah disepakati, baik dari jangka waktu peminjaman sampai masa pengembalian kredit serta balas jasa yang diperoleh, maka unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian fasilitas kredit adalah sebagai berikut (Kasmir, 2004:74-76).

a. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian, penyelidikan tentang nasabah baik secara interen maupun eksteren.

b. Kesepakatan

Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

c. Jangka waktu

Jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, menengah, atau jangka panjang.

d. Risiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik yang disengaja oleh nasabah maupun yang tidak di sengaja.

e. Balas jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga.

2.1.2.3. Tujuan Kredit

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan tertentu yang tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan. Adapun tujuan utama pemberian suatu kredit antara lain :

1. Mencari keuntungan

Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank.

2. Membantu usaha nasabah

Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut pihak debitur akan dapat memperluas dan mengembangkan usahanya.

3. Membantu pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan maka semakin baik mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor.

2.1.2.4. Jenis-Jenis Kredit

Permohonan pengajuan kredit ditujukan untuk maksud yang berbeda-beda tergantung dari kebutuhan calon debitur. Untuk itu, bank pun menyesuaikan produk kredit yang ditawarkan dengan kebutuhan calon debitur. Menurut Rivai (2005), jenis kredit yang disalurkan dapat dilihat dari berbagai segi sebagai berikut :

A. Jenis-jenis kredit yang diberikan oleh Bank Indonesia

1. Kredit Langsung

Merupakan kredit yang diberikan secara langsung kepada pihak ketiga bukan bank seperti, Pertamina, Lembaga keuangan bukan bank, Jawatan pegadaian, dan lain-lain.

2. Kredit Likuiditas

Merupakan kredit yang diberikan oleh bank sentral kepada bank-bank, baik dalam rangka pemberian kredit oleh bank yang bersangkutan kepada nasabahnya maupun untuk mengatasi kesulitan dalam keadaan darurat, dan untuk pembiayaan lainnya.

3. Fasilitas Diskonto

Merupakan penyediaan dana jangka pendek oleh Bank Indonesia dengan cara pembelian promes (surat sanggup) yang diterbitkan oleh bank umum dan bank pembangunan yang tergolong sehat dan cukup sehat serta asa dasar diskonto.

B. Jenis-jenis kredit perbankan untuk masyarakat dilihat dari segi kegunaan

1. Kredit Modal Kerja/Kredit Eksploitasi

Kredit Modal Kerja (KMK) adalah kredit berjangka waktu pendek yang diberikan oleh suatu perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja perusahaan sehingga dapat berjalan dengan lancar. Seperti pembelian bahan baku/mentah, bahan penolong/pembantu, barang dagangan, biaya eksploitasi barang modal, piutang dan lain-lain

2. Kredit Investasi

Kredit Investasi adalah kredit (berjangka menengah atau panjang) yang diberikan kepada usaha-usaha guna merehabilitasi, modernisasi,

perluasan ataupun pendirian proyek baru, misalnya untuk pembelian mesin-mesin, bangunan dan tanah untuk pabrik.

3. Kredit Konsumsi

Kredit Konsumsi adalah kredit yang diberikan bank kepada pihak ketiga/perorangan (termasuk karyawan bank itu sendiri) untuk keperluan konsumsi berupa barang atau jasa dengan cara membeli, menyewa atau dengan cara lain. Kredit yang termasuk dalam kredit konsumsi ini adalah kredit kendaraan pribadi, kredit perumahan, kredit untuk pembayaran sewa/kontrak rumah, dan pembelian alat-alat rumah tangga. Dalam kelompok ini termasuk juga kredit profesi untuk pengembangan profesi tertentu seperti, dokter, akuntan, notaris, dan lain-lain yang dijamin dengan pendapatan dari profesinya serta barang-barang yang dibeli dengan kredit tersebut.

2.1.3. Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

Dalam setiap pemberian kredit diperlukan adanya pertimbangan serta kehati-hatian agar kepercayaan merupakan unsur utama dalam kredit benar-benar terwujud sehingga kredit yang diberikan dapat mengenai sasaran dan terjamin pemberian kredit tersebut tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian. Karena penghasilan bunga dari kredit-kredit yang diberikan merupakan tulang punggung dari pendapatan bank serta untuk terjaminnya kelancaran pengembalian pokoknya, maka sudah sewajarnya andaikata pemberian kredit tersebut memerlukan perhitungan-perhitungan yang teliti sesuai dengan prinsip-prinsip pemberian kredit.

Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaian setiap bank. Biasanya kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5C. Metode analisis 5 C adalah sebagai berikut

1. *Character*

Suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang si nasabah baik dari pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti: gaya hidup, keadaan keluarga dsbnya. Ini semua ukuran “kemauan” membayar.

2. *Capacity*

Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu pula dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini. Pada akhirnya akan terlihat “kemampuannya” dalam mengembalikan kredit yang telah disalurkan.

3. *Capital*

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi *likuiditas, solvabilitas, rentabilitas*, dan ukuran lainnya. Capital juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.

4. *Colleteral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

5. *Condition*

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit itu bermasalah kecil.

2.1.3.1. Faktor Penting Kebijakan Kredit

Menurut Rivai, (2006:97), faktor-faktor penting dalam kebijakan kredit adalah:

- a. Kredit yang diberikan bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memerhatikan asas-asas perkreditan yang sehat.
- b. Salah satu upaya untuk lebih mengarahkan agar perkreditan bank telah didasarkan pada prinsip yang sehat, yaitu melalui kebijakan perkreditan yang jelas.
- c. Kebijakan perkreditan bank berperan sebagai panduan dalam pelaksanaan semua kegiatan perkreditan bank
- d. Untuk memastikan bahwa semua bank telah memiliki kebijakan perkreditan yang sehat, maka perlu berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.

e. Kebijakan perkreditan perbankan dikatakan baik bila minimal kebijakan tersebut mencakup:

- 1) Prinsip kehati-hatian perkreditan
- 2) Organisasi dan manajemen perkreditan
- 3) Kebijakan persetujuan perkreditan
- 4) Dokumentasi dan administrasi
- 5) Pengawasan kredit
- 6) Penyelesaian kredit bermasalah

2.1.3.2. Prosedur Dalam Pemberian Kredit

Prosedur pemberian dan penilaian kredit oleh dunia perbankan secara umum antar bank yang satu dengan bank yang lain tidak jauh berbeda. Yang menjadi perbedaan mungkin hanya terletak dari prosedur dan persyaratan yang ditetapkannya dengan pertimbangan masing-masing. Prosedur pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perseorangan dengan pinjaman oleh suatu badan hukum. Kemudian dapat pula ditinjau dari segi tujuannya apakah untuk konsumtif atau produktif.

1. Tahapan prakarsa dan analisa permohonan kredit

Tahapan ini dilakukan oleh pejabat pemrakarsa kredit, yang meliputi beberapa kegiatan berikut :

- a) Kegiatan prakarsa permohonan kredit. Kegiatan pada tahap ini antara lain adalah penerimaan permohonan kredit dari nasabah atau memprakarsai permohonan kredit, baik untuk permohonan kredit baru, perpanjangan kredit, perubahan jumlah kredit, perubahan syarat kredit, restrukturisasi maupun penyelesaian kredit. Permohonan kredit diajukan

secara tertulis dan menggunakan format yang telah ditentukan oleh bank yang memuat informasi lengkap mengenai kondisi pemohon/calon nasabah termasuk riwayat kreditnya pada bank lain (kalau ada). Pejabat pemrakarsa kredit selanjutnya kemudian melakukan kegiatan pencarian informasi selengkap-lengkapnyanya dari berbagai sumber mengenai pemohon.

b) Kegiatan analisa dan evaluasi kredit. Dari data dan informasi yang diperoleh pejabat pemrakarsa melakukan analisis dan evaluasi tingkat risiko kredit. Analisa dan evaluasi kredit dituangkan dalam format yang telah ditetapkan oleh bank dan disesuaikan dengan jenis kreditnya. Dalam analisa tersebut sekurang-kurangnya mencakup informasi tentang identitas pemohon, tujuan permohonan kredit, dan riwayat hubungan bisnis dengan bank. Analisis kredit yang dilakukan oleh pejabat pemrakarsa kredit meliputi analisis 5 C yang terdiri dari analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisa kualitatif dilakukan terhadap kualitas dan stabilitas usaha dengan mempertimbangkan posisi pasar dan persaingan, prospek usaha, karakter pemohon, latar belakang dan kualitas manajemennya. Analisa kuantitatif dilakukan dengan cara menganalisis kondisi keuangan pemohon untuk mengetahui usulan kredit yang dapat diterima atau ditolak.

c) Perhitungan kebutuhan kredit. Perhitungan kebutuhan kredit dimaksudkan untuk mengetahui secara pasti kredit yang benar-benar dibutuhkan oleh pemohon, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kelebihan kredit yang penggunaannya diluar usaha atau terjadi kekurangan kredit sehingga usaha tidak berjalan. Apabila dipandang perlu untuk mengetahui kepastian kredit yang dibutuhkan pemohon, bank dapat

meminta studi kelayakan yang dibuat oleh konsultan atas beban biaya pemohon.

d) Pembagian risiko kredit. Dalam upaya mengurangi risiko kredit yang harus ditanggung, bank membagi risiko tersebut dengan perusahaan asuransi, yaitu dengan melakukan asuransi kredit, asuransi kerugian maupun asuransi jiwa debitur.

e) Negoisasi kredit. Setelah kegiatan-kegiatan diatas, langkah berikutnya adalah menguji kekuatan, kelemahan dan identifikasi risiko yang merupakan kesimpulan dari seluruh analisa kredit. Kesimpulan tersebut harus mencakup hal-hal sebagai berikut: pejabat pemrakarsa dapat menyimpulkan bahwa usaha debitur yang akan dibiayai mempunyai kemampuan untuk mengembalikan pinjaman, identifikasi risiko-risiko yang akan mengancam kelangsungan usaha pemohon atau merupakan titik kritis dari usaha yang akan dibiayai, serta melakukan antisipasi terhadap risiko-risiko tersebut yang dituangkan dalam syarat dan ketentuan kredit. Setelah langkah-langkah tersebut dilakukan selanjutnya pejabat pemrakarsa kredit melakukan negoisasi dengan calon nasabah.

2. Tahapan pemberian rekomendasi kredit

Rekomendasi kredit dibuat oleh pejabat perekomendasi kredit berdasarkan analisa/evaluasi yang dibuat oleh pemrakarsa kredit. Dalam memberikan rekomendasi kredit, pejabat perekomendasi dapat meminta kelengkapan data dan analisis lebih lanjut dari pejabat pemrakarsa kredit. Disamping itu juga pejabat perekomendasi kredit dapat juga melakukan

kunjungan ke lapangan untuk meyakinkan data/keterangan-keterangan yang telah disajikan akurat.

3. Tahapan pemberian keputusan

Pemberian putusan kredit hanya dapat dilakukan oleh pejabat pemutus kredit atau komite kredit yang diberikan kewenangan memutus kredit dari direksi bank. Sebelum memberikan putusan kredit pejabat pemutus kredit harus memeriksa dan meneliti kelengkapan paket kredit.

4. Tahapan persetujuan pencairan kredit

Pencairan kredit dapat dilakukan setelah intruksi pencairan kredit ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, yaitu pejabat administrasi kredit sebagai pembuat intruksi dan disetujui oleh pimpinan unit kerja yang bersangkutan. Adapun syarat untuk menerbitkan intruksi pencairan kredit adalah surat pencairan kredit dan surat perjanjian *accessoir* yang mengikutinya telah ditandatangani secara sah oleh pihak-pihak yang bersangkutan, semua dokumen yang telah ditetapkan dalam putusan kredit telah lengkap dan telah diperiksa keabsahannya dan telah memberikan perlindungan bagi bank, serta semua biaya-biaya yang berkaitan dengan pemberian kredit telah dilunasi oleh pemohon.

2.1.4. LOAN TO DEPOSIT RATIO

Loan to Deposit Ratio (LDR) adalah rasio antara seluruh jumlah kredit yang diberikan terhadap dana pihak ketiga. Besarnya jumlah kredit yang disalurkan akan menentukan keuntungan bank. Jika bank tidak mampu menyalurkan kredit sementara dana yang terhimpun banyak maka akan menyebabkan bank tersebut rugi.

“Loan to Deposit Ratio (LDR) adalah rasio untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan (Kasmir, 2008:290)”.

Rumus *Loan to Deposit Ratio* sebagai berikut:

$$\text{Loan To Deposit Ratio} = \frac{\text{Jumlah Kredit yang diberikan}}{\text{Jumlah Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Pengelolaan likuiditas merupakan masalah yang cukup kompleks dalam kegiatan operasi bank, hal tersebut disebabkan karena dana yang dikelola bank sebagian besar adalah dana dari masyarakat yang sifatnya jangka pendek dan dapat ditarik sewaktu-waktu.

“Likuiditas suatu bank berarti bahwa bank tersebut memiliki sumber dana yang cukup tersedia untuk memenuhi semua kewajibannya (Siamat, 2005)”.

Rasio LDR digunakan untuk mengukur kemampuan bank tersebut apakah mampu membayar hutang-hutangnya dan membayar kembali kepada deposannya, serta dapat memenuhi permintaan kredit yang diajukan. Atau dengan kata lain seberapa jauh pemberian kredit kepada nasabah, kredit dapat mengimbangi kewajiban bank untuk segera memenuhi permintaan deposan yang ingin menarik kembali uangnya yang telah digunakan oleh bank untuk memberikan kredit (Dendawijaya, 2003).

“Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.6/ 23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 Lampiran 1e, LDR dapat diukur dari perbandingan antara seluruh jumlah kredit yang diberikan terhadap dana pihak ketiga”.

“Besarnya jumlah kredit yang disalurkan akan menentukan keuntungan bank. Jika bank tidak mampu menyalurkan kredit sementara dana yang terhimpun banyak maka akan menyebabkan bank tersebut rugi (Kasmir, 2004)”.

Semakin tinggi LDR maka laba perusahaan semakin meningkat (dengan asumsi bank tersebut mampu menyalurkan kredit dengan efektif, sehingga jumlah

kredit macetnya akan kecil). Kredit yang diberikan adalah kredit yang diberikan bank yang sudah ditarik atau dicairkan bank. Kredit yang diberikan tidak termasuk kredit kepada bank lain.

“ Sedangkan yang termasuk dalam pengertian dana pihak ketiga adalah giro, deposito, dan tabungan (Sinungan, 2000). Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, besarnya standar nilai LDR menurut Bank Indonesia adalah antara 85%-100% (Dendawijaya, 2003)”.

2.1.5. NON PERFORMING LOAN

2.1.5.1. Pengertian Non Performing Loan (Kredit Bermasalah)

Non Performing Loan (NPL) merupakan rasio keuangan yang berkaitan dengan risiko kredit. Risiko kredit adalah risiko dari kemungkinan terjadinya kerugian bank sebagai akibat dari tidak dilunasinya kembali kredit yang diberikan bank kepada debitur. *Non Performing Loan* adalah perbandingan antara total kredit bermasalah dengan total kredit yang di berikan kepada debitur. Bank dikatakan mempunyai NPL yang tinggi jika banyaknya kredit yang bermasalah lebih besar daripada jumlah kredit yang diberikan kepada debitur. Apabila suatu bank mempunyai NPL yang tinggi, maka akan memperbesar biaya, baik biaya pencadangan aktiva produktif maupun biaya lainnya, dengan kata lain semakin tinggi NPL suatu bank, maka hal tersebut akan mengganggu kinerja bank tersebut.

Dalam dunia perbankan, suatu kredit dapat dikategorikan dalam kredit bermasalah apabila:

1. Terjadi keterlambatan pembayaran bunga dan/atau kredit induk , lebih dari 90 hari semenjak tanggal jatuh temponya;
2. Tidak dilunasi sama sekali; atau

3. Diperlakukan negosiasi kembali atas syarat pembayaran kembali kredit dan bunga yang tercantum dalam pemberian kredit.

Kelancaran debitur dalam membayar kewajibannya, yaitu pokok angsuran dan bunga, adalah sebuah keharusan. Karena bank merupakan lembaga intermediasi perbankan yang tugasnya menampung dan menyalurkan dana dari dan ke masyarakat. Sehingga pembayaran kredit oleh debitur merupakan sebuah keharusan agar kegiatan operasional bank tetap dapat berjalan dengan lancar. Apabila terjadi banyak penunggakan pembayaran kredit oleh debitur maka berarti bank tidak bisa mendapatkan kembali modal yang telah dikeluarkannya, dan hal ini tentu saja dapat mempengaruhi tingkat kesehatan bank dan bisa berefek pada penurunan tingkat kepercayaan masyarakat. Tingkat kesehatan bank merupakan hal yang penting yang harus diusahakan oleh manajemen bank. Pengelola bank diharuskan memantau keadaan kualitas aktiva produktif yang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kesehatannya (Harlen Butar-butar dan Aris Budi Setyawan). Penilaian terhadap kualitas aktiva produktif didasarkan pada tingkat kolektibilitas kreditnya.

“Penggolongan kolektibilitas aktiva produktif sampai sejauh ini hanya terbatas pada kredit yang diberikan. Ukuran utamanya adalah ketepatan pembayaran kembali pokok dan bunga serta kemampuan debitur baik ditinjau dari usaha maupun nilai agunan kredit yang bersangkutan (Syahyunan, 2002)”.

Bank sendiri sudah memiliki kriteria dalam memberi penilaian dan menggolongkan kemampuan debitur, dalam mengembalikan pembayaran pokok atau angsuran dan bunga sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati, yang diatur dalam Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 31/147/KEP/DIR tahun 1998. Dalam surat keputusan tersebut kredit digolongkan menjadi lima,

yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Tingkat kolektibilitas kredit yang dianggap bermasalah dan dapat mengganggu kegiatan operasional adalah kredit macet atau dikenal dengan Non Performing Loan (NPL) yang mana merupakan persentase kredit bermasalah (dengan kriteria kurang lancar, diragukan dan macet terhadap total kredit yang disalurkan).

Setiap penanaman dana bank dalam aktiva produktif dinilai kualitasnya dengan menentukan tingkat kolektibilitasnya. Kolektibilitas dapat diartikan sebagai keadaan pembayaran kembali pokok, angsuran pokok atau bunga kredit oleh nasabah serta tingkat kemungkinan diterima kembali dana yang ditanamkan dalam surat berharga atau penanaman lainnya. Sedangkan tingkat kolektibilitas dapat dibedakan menjadi empat tingkat, yaitu apakah lancar, kurang lancar, diragukan, atau macet. Perbedaan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya suatu kerugian yang diakibatkan oleh adanya kredit yang tidak terbayarkan atau kredit bermasalah.

“Risiko kredit yang diterima oleh bank merupakan salah satu risiko usaha bank, yang diakibatkan dari tidak dilunasinya kembali kredit yang diberikan oleh pihak bank kepada debitur. Oleh karena itu kemampuan pengelolaan kredit sangat diperlukan oleh bank yang bersangkutan (Sinungan, 2000)”.

Dalam penelitian ini digunakan rasio NPL dalam menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan bank tersebut. Rasio NPL digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank.

“Risiko kredit yang diterima oleh bank merupakan salah satu risiko usaha bank, yang diakibatkan dari ketidakpastian dalam pengembaliannya atau yang diakibatkan dari tidak dilunasinya kembali kredit yang diberikan oleh pihak bank kepada debitur, (Hasibuan, 2007)”.

“Menurut Surat Edaran BI No. 3/30DPNP tanggal 14 Desember 2001 Lampiran 14, NPL diukur dari rasio perbandingan antara kredit bermasalah terhadap total kredit yang diberikan”.

NPL yang tinggi akan memperbesar biaya, sehingga berpotensi terhadap kerugian bank. Semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar, dan oleh karena itu bank harus menanggung kerugian dalam kegiatan operasionalnya.

Kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet. Sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, besarnya NPL yang baik adalah di bawah 5%

Kredit bermasalah (*non performing loan*) adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikannya.

“NPL ini dapat juga diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan baik akibat faktor kesengajaan yang dilakukan oleh debitur maupun factor ketidaksengajaan yang berasal dari faktor luar (Meydianawathi, 2006)”.

Rasio *Non Performing Loan* (NPL) ini dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$NPL = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Kredit yang Disalurkan}} \times 100\%$$

Bank yang mengalami peningkatan penyaluran kredit akan memiliki kemungkinan adanya Non Performing Loan yang meningkat sejalan dengan beban. Hal tersebut tentu saja akan mempengaruhi pertumbuhan modal bank. Selain besarnya beban operasional dan meningkatnya NPL yang dapat mempengaruhi pertumbuhan modal, terdapat faktor lain yang mempengaruhi jumlah modal yaitu pembagian deviden yang tidak seimbang dengan laba ditahan

karena modal bersih bank mencerminkan jumlah dana yang akan disalurkan kembali kepada masyarakat (Budiawan, 2008).

2.1.5.2. Penggolongan Kualitas Kredit

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor:7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum ditetapkan secara tegas penggolongan ditinjau dari segi kualitas kredit, maka kredit dibagi menjadi 5 tingkatan, yaitu:

1. Lancar (*pass*), apabila memenuhi kriteria:
 - a. Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu; dan
 - b. Memiliki mutasi rekening yang aktif; atau
 - c. Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*).
2. Dalam Perhatian Khusus (*special mention*), apabila memenuhi kriteria:
 - a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari; atau
 - b. Kadang-kadang terjadi cerukan; atau
 - c. Mutasi rekening relatif aktif; atau
 - d. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan; atau
 - e. Didukung oleh pinjaman baru.
3. Kurang Lancar (*Substandard*), apabila memenuhi kriteria:
 - a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari; atau
 - b. Sering terjadi cerukan; atau
 - c. Frekuensi rekening relatif rendah; atau
 - d. Terjadi pelanggaran kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari; atau
 - e. Terdapat indikasi masalah keuangan debitor; atau

f. Dokumentasi pinjaman lemah.

4. Diragukan (*doubtful*), apabila memenuhi kriteria:

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari; atau
- b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen; atau
- c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari; atau
- d. Terjadi kapitalisasi bunga; atau
- e. Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.

5. Macet (*loss*), apabila memenuhi kriteria:

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari; atau
- b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru; atau
- c. Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

2.1.5.3 Penyebab Kredit Macet

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya kredit bermasalah, yaitu

a. Faktor intern bank, meliputi:

- 1). Rendahnya kemampuan atau ketajaman bank melakukan analisis kelayakan permintaan kredit yang diajukan debitor. Rendahnya kemampuan melakukan analisis kredit secara profesional, terutama disebabkan karena rendahnya pengetahuan dan pengalaman petugas bank (termasuk *account officer*) menjalankan tugas tersebut. Sedangkan

tumpulnya analisis kelayakan kredit seringkali terjadi karena pimpinan bank mendapat tekanan halus atau tidak dari pihak ketiga untuk meluluskan permintaan kredit, karena terjadi kolusi antara pimpinan bank dengan calon debitur, atau karena strategi pemberian kredit yang terlalu ekspansif. Strategi pemberian kredit yang terlalu ekspansif ini timbul, karena bank yang bersangkutan terlalu cepat menghimpun dana dari masyarakat (termasuk deposito), sehingga mendorong mereka untuk menerapkan strategi penyaluran kredit yang melebihi tingkat kewajaran. Kredit yang diberikan tanpa analisis kredit yang profesional, dari semula memang diragukan mutunya. Oleh karena itu, sejak diberikan kredit tersebut memang sudah membawa bibit masalah.

- 2). Lemahnya sistem informasi kredit serta sistem pengawasan dan administrasi kredit.

Lemahnya sistem pengawasan dan administrasi kredit, berakibat pimpinan bank tidak dapat memantau penggunaan kredit serta perkembangan kegiatan usaha maupun kondisi keuangan debitur secara cermat. Akibatnya, mereka tidak dapat melakukan tindakan koreksi apabila terjadi penurunan kondisi bisnis atau keuangan debitur atau terjadi penyimpangan dari ikatan perjanjian kredit.

- 3). Campur tangan yang berlebihan dari para pemegang saham bank dalam keputusan pemberian kredit.

Campur tangan pemegang saham yang berlebihan terhadap penerapan kebijaksanaan perkreditan bank dapat menimbulkan pemberian kredit yang menyimpang dari asas perkreditan yang sehat.

4). Pengikatan jaminan kredit yang kurang sempurna

Jaminan kredit merupakan sumber kedua dana pelunasan kredit. Apabila debitor tidak bersedia melunasi saldo kredit dan bunga yang tertunggak, bank dapat mengeksekusi jaminan guna melunasi pinjaman yang tertunggak. Apabila ikatan jaminan diadakan secara sempurna dan jaminan dapat dieksekusi dengan lancar, maka tunggakan pinjaman debitor dapat diselesaikan dengan cepat. Sebaliknya, apabila pengikatan jaminan tidak dilakukan dengan sempurna, hal tadi dapat mejadi sebab tunggakan pinjaman berkembang menjadi kredit yang harus dihapuskan.

b. Faktor debitor, yaitu:

Debitor bank terdiri dari 2 (dua) kelompok, yaitu perorangan dan perusahaan atau korporasi. Sumber dana pembayaran bunga dan angsuran kredit sebagian besar berasal dari debitor perorangan (*consumer debtors*) adalah penghasilan tetap mereka, misalnya gaji, upah, honorarium, dan sebagainya. Setiap jenis gangguan terhadap kesinambungan penerimaan penghasilan tetap itu akan mengganggu likuiditas keuangan mereka sehingga menyebabkan ketidaklancaran pembayaran bunga dan/atau cicilan kredit. Penyebab kredit bermasalah perorangan yang lain erat hubungannya dengan gangguan terhadap diri pribadi debitor, misalnya kecelakaan, sakit, kematian, dan perceraian. Sedangkan penyebab kredit korporasi bermasalah pada umumnya disebabkan karena salah arus (*mis.management*), dan atau kurangnya pengetahuan dan pengalaman pemilik perusahaan dalam bidang usaha yang mereka jalankan, dan karena adanya penipuan (*fraud*).

c. Faktor Ekstern dari bank

Penyebab kredit bermasalah yang dapat dikategorikan sebagai factor ekstern antara lain adalah:

1. Kegagalan usaha debitor,
2. Menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit,
3. Pemanfaatan iklim persaingan dunia perbankan yang tidak sehat oleh debitor yang tidak bertanggung jawab, dan
4. Musibah yang menimpa perusahaan debitor.

Secara garis besar, penyebab kredit macet adalah faktor eksternal dan internal. Tabel 2.1 merangkum berbagai penyebab kredit macet.

Tabel 2.1
Penyebab Kredit Macet

Klasifikasi	Kemungkinan Penyebab
Faktor Eksternal	Lingkungan Usaha Debitur
	Musibah (Kebakaran, Bencana Alam) Atau Kegagalan Usaha
	Persaingan antar Bank Tidak Sehat
Faktor Internal	Kebijakan Perkreditan yang Kurang Menunjang
	Kelemahan Sistem dan Prosedur Penilaian Kredit
	Pemberian dan pengawasan kredit yang menyimpang dari Prosedur
	Itikad yang kurang baik dari pemilik, pengurus dan pegawai Bank

Sumber: Disarikan dari Djiwandono (1994)

Kendati kredit macet telah banyak diidentifikasi, dalam praktek tidak muda mencari jalan keluarnya. Bank Indonesia telah melakukan beberapa langkah strategis untuk mengatasi kredit bermasalah., yaitu: (1) membantu perbankan

dalam menyelesaikan kredit bermasalah; (2) meningkatkan pembinaan bank bermasalah; (3) mencegah terjadinya kredit bermasalah di masa mendatang. Kredit bermasalah merupakan kondisi yang sangat ditakuti oleh setiap pegawai bank, karena dengan adanya kredit bermasalah tersebut akan menyebabkan menurunnya pendapatan bank, yang selanjutnya kemungkinan terjadinya penurunan laba.

2.1.6. Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Macet

Untuk mengatasi kredit bermasalah tersebut upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pihak bank pada tahapan pertama adalah upaya penyelamatan kredit, dengan syarat apabila bank mempunyai keyakinan bahwa usaha nasabah masih mempunyai prospek untuk berkembang. Yang dimaksud dengan upaya-upaya bank yang disebut penyelamatan kredit adalah upaya-upaya bank untuk melancarkan kembali kredit yang telah tergolong ‘tidak lancar’, ‘diragukan’, atau bahkan telah tergolong ‘macet’ untuk dikembalikan menjadi ‘kredit lancar’, sehingga debitor kembali mempunyai kemampuan untuk membayar kepada bank, baik bunga maupun pokoknya

Rencana tindak lanjut yang dapat dilakukan dalam upaya penyelamatan kredit bermasalah jika diperkirakan prospek usaha masih baik adalah dengan cara 3 R, yaitu:

a.) **Penjadwalan kembali (*Rescheduling*)**, yaitu upaya penyelamatan kredit dengan melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali kredit atau jangka waktu, termasuk *grace period* baik termasuk besarnya jumlah angsuran maupun tidak.

1. Memperpanjang jangka waktu kredit

Dalam hal ini si debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi satu tahun sehingga si debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.

2. Memperpanjang jangka waktu angsuran

Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu kredit. Dalam hal ini jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang pembayarannya pun misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali dan hal ini tentu saja jumlah angsuran pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

b) **Persyaratan kembali (*Reconditioning*)**, yaitu upaya penyelamatan kredit dengan cara melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh syarat perjanjian kredit yang tidak terbatas hanya pada perubahan jadwal angsuran atau jangka waktu kredit saja, namun perubahan tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi equity perusahaan. Dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti;

a. Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan hutang pokok.

b. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu.

Dalam hal penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.

c. Penurunan suku bunga.

Penurunan suku bunga dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabah. Sebagai contoh jika bunga per tahun sebelumnya dibebankan 20 % diturunkan menjadi 18 %. Hal ini tergantung dari pertimbangan yang bersangkutan. Penurunan suku bunga akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil, sehingga diharapkan dapat membantu meringankan nasabah.

d. Pembebasan bunga.

Dalam pembebasan suku bunga diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah sudah akan mampu lagi membayar kredit tersebut. Akan tetapi nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas.

c) **Penataan kembali (*Restructuring*)**, yaitu upaya penyelamatan dengan melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi equity perusahaan dan equity bank yang dilakukan dengan atau tanpa *rescheduling* dan/atau *reconditioning*.

a. Dengan menambah jumlah kredit

b. Dengan menambah equity Yaitu dengan:

- Dengan menyetor uang tunai
- Tambahan dari pemilik

d). Kombinasi, Merupakan kombinasi dari ketiga jenis yang diatas.

e). Penyitaan jaminan. Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya itikad baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua hutang-hutangnya.

2.2. Kajian Empiris

Himaniar Triasdini (2010) menunjukkan pengaruh CAR, NPL, dan ROA terhadap penyaluran kredit modal kerja, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa NPL mempunyai hubungan yang erat dengan penyaluran kredit perbankan. Pada saat tingkat NPL meningkat berarti tingkat kolektibilitas kredit dari nasabah akan menurun yang menyebabkan bank mengalami hambatan dalam mengumpulkan modalnya dan bank akan lebih berhati-hati.

Nur Ariani Aqidah (2010) menunjukkan kebijakan pemberian kredit dan pengaruh *loan to deposit ratio* terhadap *non performing loan* pada Bank Tabungan Negara. Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemberian kredit pada Bank tabungan Negara sudah sesuai dengan teori kebijakan pemberian kredit dan terdapat pengaruh *loan to deposit ratio* terhadap *non performing loan*.

Rita rosmilia (2009) menunjukkan pelaksanaan penyelesaian kredit bermasalah (*non performing loan*) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.Cabang Semarang Pattimura. Penelitian ini menunjukkan prosedur dan pelaksanaan pemberian kredit, faktor penyebab kredit bermasalah dan cara-cara penyelesaian kredit bermasalah.

Chandra dewi (2009) menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi strategi pemberian kredit dan dampaknya terhadap *non performing loan* pada BPR Propinsi Jawa Tengah, hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemberian kredit sangat berpengaruh signifikan terhadap *non performing loan*.

Budiawan (2008), Melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran kredit pada BPR. Variabel dependennya adalah penyaluran kredit itu sendiri, sedang variabel independennya adalah tingkat suku

bunga, kredit non lancar, tingkat kecukupan modal, dan jumlah simpanan masyarakat. Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah tingkat suku bunga berpengaruh negatif dan signifikan, NPL memiliki hubungan yang negatif dan tidak signifikan yaitu tidak mempengaruhi penyaluran kredit, tingkat kecukupan modal berpengaruh positif dan signifikan, jumlah simpanan berpengaruh positif dan signifikan.

Kurniasari (2007) menunjukkan analisa pengaruh efisiensi dan penyaluran dana kredit terhadap kredit bermasalah pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa di Indonesia, dimana rasio-rasio yang digunakan yaitu rasio Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), *Loan to Deposit Ratio* (LDR) dan *Non Performing Loan* (NPL). Hasil penelitian menunjukkan bahwa BOPO dan LDR mempunyai pengaruh signifikan terhadap *Non Performing Loan*.

Fransisca dan Hasan Sakti Siregar (2007), Penelitian yang dilakukan adalah mengenai pengaruh faktor internal bank terhadap volume kredit pada bank yang Go Public di Indonesia. Variabel independen yang digunakan adalah dana pihak ketiga ketiga, CAR, ROA, NPL. Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah dana pihak ketiga (DPK) memiliki pengaruh yang positif terhadap volume kredit, CAR menunjukkan tidak ada pengaruh yang signifikan dan tidak dapat digunakan untuk memprediksi volume kredit, ROA mempunyai hubungan yang positif terhadap volume kredit, dan NPL juga tidak dapat digunakan untuk memprediksi volume kredit.

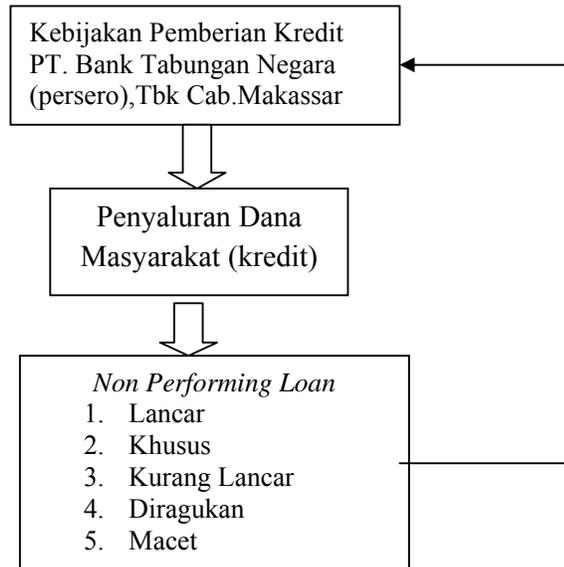
2.3. KERANGKA PIKIR

Berdasarkan masalah yang ada, maka dapat dibuat suatu kerangka pikir mengenai analisis kebijakan pemberian kredit terhadap *Non Performing Loan*

pada PT. Bank Tabungan Negara (persero), Tbk Cabang Makassar secara sistematis pada gambar berikut:

Gambar 2.1.

Kerangka Pikir



Sumber : Peneliti 2012

Dari model penelitian di atas dapat dilihat bahwa variabel terdiri atas variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas terdiri dari kebijakan pemberian kredit. Untuk, variabel terikat terdiri atas *non performing Loan*.

“Menurut Rivai (2005:97) ketentuan kebijakan kredit perlu ditetapkan agar setiap bank memiliki dan menerapkan kebijakan kredit yang baik”.

Hal ini disebabkan kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko. Salah satu upaya untuk lebih mengarahkan agar perkreditan bank telah didasarkan pada prinsip yang sehat, yaitu melalui kebijakan perkreditan yang sehat. Dengan adanya kebijakan pemberian kredit yang diterapkan akan menjadi tolak ukur terhadap penyaluran kredit kepada masyarakat. Selain itu, kebijakan perkreditan diterapkan untuk mengatasi kemungkinan risiko kredit yang bermasalah dan memperoleh tingkat *Non Performing Loan* yang rendah di masa yang akan datang.

Salah satu kebijakan pemberian kredit yang harus ada pada setiap bank yaitu kebijakan dalam penyelamatan kredit bermasalah (*non performing loan*). Kebijakan ini perlu dalam suatu bank karena hal ini akan berdampak pada seluruh aspek pada suatu bank. Kebijakan ini diterapkan untuk mengatasi kemungkinan risiko kredit yang bermasalah dan memperoleh tingkat *Non Performing Loan* yang rendah di masa yang akan datang. *Non Performing Loan* adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikannya, pembayaran yang dilakukan tersendat-sendat, sulit untuk memperoleh pelunasan, bahkan tidak dapat ditagih.

2.4. Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut :

1. Diduga bahwa kebijakan pemberian kredit pada PT. Bank Tabungan Negara (persero), Tbk Cabang Makassar, sudah sesuai berdasarkan kebijakan perbankan.
2. Diduga bahwa pemberian kredit pada PT. Bank Tabungan Negara (persero), Tbk Cabang Makassar memiliki pengaruh yang signifikan kuat terhadap *Non Performing Loan*.